

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI TELANAIPURA



LAPORAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

TAHUN 2024

JAMBI, 31 JANUARI 2025

PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Telanaipura dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Jambi Telanaipura. Selain itu, Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas, serta perwujudan *good governance* secara berkesinambungan.

Seluruh aparatur KPP Pratama Jambi Telanaipura dalam menjalankan Rencana Strategis tersebut telah disatukan dalam visi yang berbunyi sebagai berikut :

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama terbaik yang berintegritas dan profesional dalam rangka mendukung kedaulatan dan kemandirian negara.”

Adapun Misi KPP Pratama Jambi Telanaipura dengan mengacu kepada Misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. Memperkuat integritas dengan Wajib Pajak dan sesama pegawai;
2. Membangun budaya kerja pegawai yang:
 - Jujur dalam bekerja dengan dilandasi integritas tinggi;
 - Amanah dalam mengemban tugas yang dibebankan;
 - Yakin bahwa Tuhan YME akan melindungi dan menjaga dalam melaksanakan pekerjaan;
 - Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif dalam mengemban tugas;
3. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional terhadap Wajib Pajak sebagai wujud pelayanan prima.”

Dengan menyatakan visi dan misi tersebut terkandung maksud agar seluruh aparat di lingkungan KPP Pratama Jambi Telanaipura sepakat betapa beratnya tugas yang harus dilaksanakan akan dijadikan tantangan untuk meraih keberhasilan yang semakin baik dari hari ke hari.

Pelaksanaan Visi dan Misi KPP Pratama Jambi Telanaipura berpedoman pada Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.1012020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dijelaskan bahwa KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran serta bimbingan sangat diharapkan agar pada tahun-tahun yang akan datang lebih baik.

Jambi, 31 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Edi Sihar Tambunan

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	4
A. RENCANA STRATEGIS.....	4
B. TARGET KINERJA.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	8
B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	11
C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	20
D. ANALISIS ANGGARAN	22
BAB IV PENUTUP	23
LAMPIRAN	234

BAB I PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura berlokasi di Jl. Jend. A Thalib, Pematang Sulur, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura berada dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura meliputi Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jambi Telanaipura dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengeti yang merupakan unit pembantu yang berada dibawahnya.

KPP Pratama Jambi Telanaipura memiliki wilayah kerja yang cukup luas meliputi:

1. Kota Jambi dengan luas wilayah 112,08 km², dengan lima kecamatan:
 - a. Kecamatan Telanaipura dengan luas wilayah 22,51 km²;
 - b. Kecamatan Kota Baru dengan luas wilayah 36,11 km²;
 - c. Kecamatan Alam Barajo dengan luas wilayah 41,56 km²;
 - d. Kecamatan Danau Sipin dengan luas wilayah 7,88 km²; dan
 - e. Kecamatan Pasar Jambi dengan luas wilayah 4,02 km².
2. Kabupaten Muaro Jambi dengan luas wilayah mencapai 5.246 km² yang terdiri dari 11 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Sekernan dengan luas wilayah 671,60 km²;
 - b. Kecamatan Maro Sebo dengan luas wilayah 261,71 km²;
 - c. Kecamatan Taman Rajo dengan luas wilayah 352,67 km²;
 - d. Kecamatan Kumpeh Ulu dengan luas wilayah 386,65 km²;
 - e. Kecamatan Kumpeh dengan luas wilayah 1.658,93 km²;
 - f. Kecamatan Sungai Gelam dengan luas wilayah 654,41 km²;
 - g. Kecamatan Mestong dengan luas wilayah 474,70 km²;
 - h. Kecamatan Bahar Selatan dengan luas wilayah 195,69 km²;
 - i. Kecamatan Sungai Bahar dengan luas wilayah 160,50 km²;
 - j. Kecamatan Bahar Utara dengan luas wilayah 167,26 km²;
 - k. Kecamatan Jambi Luar Kota dengan luas wilayah 280,12 km².

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah

wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayahwewenang KPP;
3. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajakmaupun masyarakat;
8. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produklayanan perpajakan;
11. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internaldan eksternal;
13. Pemutakhiran basis data perpajakan;
14. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. Pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan;
19. Pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
20. Pelaksanaan administrasi kantor.

Fungsi tersebut dijalankan melalui struktur organisasi yang terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI;
11. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
12. KP2KP Sengeti.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura dalam upayanya mencapai target penerimaan pajak tidak hanya memiliki potensi yang dapat direalisasikan menjadi penerimaan pajak namun juga menghadapi berbagai permasalahan yang dijadikan sebagai tantangan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Beberapa area dalam wilayah kerja masih cukup sulit dijangkau, antara lain karena sarana transportasi yang kurang memadai dan sarana/prasarana komunikasi digital (*online*) yang masih terbatas;
2. Karakteristik Wajib Pajak yang memiliki resistensi tinggi terhadap pajak, sehingga dalam membangun kesadaran Wajib Pajak tidak dapat hanya mengandalkan sosialisasi atau cara persuasif, akan tetapi dengan melakukan penegakan hukum pula;
3. Ketersediaan tempat pembayaran pajak/bank persepsi di daerah tertentu masih minim dan kendala transportasi membuat jarak tempuh dari tempat pembayaran pajak tersebut dari lokasi Wajib Pajak berada dianggap jauh;
4. Terdapat *remote* area yang tidak terjangkau oleh akses internet (*blank spot*); dan
5. Citra pegawai pajak yang kurang baik dimata masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam melakukan upaya persuasif dalam menghimpun penerimaan pajak.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Rencana Strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang akan timbul.

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kemudian rencana strategis tersebut diadopsi oleh KPP Pratama Jambi Telanaipura sebagai kantor pelayanan pajak yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi.

A. RENCANA STRATEGIS

Tujuan yang ingin dicapai oleh KPP Pratama Jambi Telanaipura sebagaimana juga diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan dengan 3 (tiga) amanat strategi:
 - a. Penyusunan peraturan perundang-undangan *fiscal* dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja untuk percepatan penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi nasional dampak *Covid-19*,
 - b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkankinerja perekonomian yang terdampak *Covid-19*, dan
 - c. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.
2. Penerimaan negara yang optimal dengan 9 (sembilan) amanat strategi:
 - a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya;
 - b. Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait *Covid-19*;
 - c. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);

- d. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP berbasis digital yang terfokus pada *user experience* dan *user friendly*;
 - e. Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai serta pemetaan potensi PNBP;
 - f. Modernisasi system administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP;
 - g. Penguatan *joint program* penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - h. Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial; dan
 - i. Penguatan pengawasan perpajakan dan PNBP serta pemberantasan penyeludupan dan barang-barang ilegal.
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien DJP mendukung 3 (Tiga) arah kebijakan Kementerian Keuangan yaitu:
- a. Organisasi dan SDM yang optimal yaitu pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*);
 - b. System informasi yang andal dan terintegrasi yaitu pengembangan proyek strategis kementerian keuangan; dan
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah yaitu peningkatan dan penguatan peran unit Kepatuhan Internal (KI).

Sasaran Strategis KPP Pratama Jambi Telanaipura Tahun 2024 dan penjabarannya dalam bentuk uraian umum kinerja adalah sebagai berikut:

No	Daftar Sasaran Organisasi	Keterangan
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Peningkatan <i>voluntary and enforced tax compliance</i> Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Peningkatan <i>voluntary and enforced tax compliance</i> Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku

5	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal
6	Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif	Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
7	Penegakan Hukum yang Efektif	Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP
8	Data dan Informasi yang Berkualitas	Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan
10	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya

B. TARGET KINERJA

Target kinerja menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap IKU yang adakan digunakan dalam Renstra. Dalam rangka ikut mendukung mewujudkan visi dan misi Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024. KPP Pratama Jambi Telanaipura memiliki 10 Sasaran Strategis yang memiliki indeks pengukuran kinerja masing-masing. Pada Tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Jambi Telanaipura mengalami peningkatan sekitar 2% dibandingkan Tahun 2023 dengan indeks capaian seluruhnya “hijau”.

Adapun rincian pencapaian kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	101,38
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,38
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,80%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,80
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	102,18	Max	P/L	19,00%	42,22%	102,18
Customer Perspective							20,00%	100,65
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,02
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,86%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,86
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,23%	Max	P/L	19,00%	42,22%	101,23
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,28
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,28%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,28
Internal Process Perspective							25,00%	117,62
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							116,04
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	112,08%	Max	E/M	21,00%	50,00%	112,08
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	114,41%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,35
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,50%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,50
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,56%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,56
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemerkasaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	120,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	78,73%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	116,31
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,61
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	116,90	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,90
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,23	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,86
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,10	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,02

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Jambi Telanipura untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi : KPP Pratama Jambi Telanaipura

Tahun Anggaran : 2024

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET		REALISASI		GAP
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$	100,00%	2.481.138.241.000	100,80%	2.501.066.955.362	0,80%
				2.481.138.241.000		2.481.138.241.000	
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas})$	100,00%	100,00%	102,18%	102,18%	2,18%
				100,00%		100%	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$	100,00%	2.247.959.968.000	100,86%	2.267.227.600.810	-0,37%
				2.247.959.968.000		2.247.959.968.000	
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP-wajib SPT}) + (\text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP-wajib SPT})}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$	100,00%	100,00%	101,23%	101,23%	1,23%
				100,00%		100%	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$	100,00%	233.178.273.000	100,28%	233.839.354.552	0,28%
				233.178.273.000		233.178.273.000	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$	74,00%	74,00%	148%	88,80%	74%
				74,00%		60,00%	
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	Indeks Hasil Survei	100,00%	5%	120,00%	18,00%	20%
				5%		15%	

5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$	90,00%	90,00%	127,12%	114,41%	37,12%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$	100,00%	100%	120,00%	120,00%	20%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	20%

6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan	100,00%	100,00%	118,56%	118,56%	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$ Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%	100,00%	100%	120,00%	120,00%	20%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$	75,00%	75%	152,89%	114,67%	78%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah x100% Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	100,00%	100%	100%	100,00%	0%
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi	$\frac{(\text{Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2}$ x 100%	100,00%	100%	154,94%	123,95%	55%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	$30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right)$	55%	55%	179,83%	71,93%	125%
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$	100%	100%	116,90%	116,90%	17%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak}) - \text{Faktor Koreksi})$	85%	85%	110,86%	94,23%	26%

9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko	90%	90%	110,11%	99,10	20%
				90%		90,00	
10a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Triwulan I s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100) Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (Indeks 100)	100,00%	100,00%	120,00%	120,00	20%
				100,00%		100	

B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

Penerimaan Pajak Negara yang Optimal tercermin dari 2 IKU yakni 1a-CP dan 1b-CP. Dimana dua IKU ini memperlihatkan capaian penerimaan pajak, pertumbuhan penerimaan pajak, dan deviasi kas. Pada Tahun 2024, KPP Pratama Jambi Telanaipura memperoleh target penerimaan pajak sebesar 2.481.138.241.000 dengan capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 sebesar 2.501.066.955.362 atau sebesar 100.8% dengan pertumbuhan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 102.18%.

Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang dan mengoptimalkan penerimaan pajak, pertumbuhan bruto, dan deviasi kas. Adapun upaya yang telah dilaksanakan yakni sebagai berikut:

- a. Pencarian data eksternal dan internal;
- b. Menindaklanjuti data DSE yang diturunkan kantor pusat;
- c. Pengawasan kenaikan dan penurunan pembayaran pajak masa;
- d. Menindaklanjuti data pemicu dan data penguji;
- e. Menindaklanjuti DPP baik kolaboratif maupun DPP dari hasil analisis mandiri; dan
- f. Pengawasan terhadap realisasi anggaran instansi pemerintah.

2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi adalah salah satu sasaran strategis yang menjadi target instansi untuk merubah perilaku Wajib Pajak agar lebih mengerti terkait dengan kewajiban perpajakan. Dalam sasaran strategis ini terdapat dua IKU sebagai penjabaran dari sasaran strategis yakni:

- 2a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM); dan
- 2b-CP: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

Pada Tahun 2024, KPP Pratama Jambi Telanaipura telah secara optimal mengusahakan pencapaian target tersebut. Pencapaian IKU 2a-CP sebesar 100.86% dan IKU 2b-CP sebesar 101.23%. Capaian dua IKU tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menunjang tercapainya IKU Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi, antara lain:

- a. Pencarian data eksternal dan internal;
- b. Menindaklanjuti data DSE yang diturunkan kantor pusat;

- c. Dinamisasi;
- d. Pengawasan pembayaran masa;
- e. Menindaklanjuti data pemicu dan data penguji; dan
- f. Melakukan kunjungan dalam rangka menindaklanjuti SP2DK.

Sedangkan upaya yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKU 2b-CP, yaitu:

Dari Sisi Penyuluhan

- a. Membentuk Tim Satuan Tugas Penerimaan SPT Tahunan melalui Surat Keputusan Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura Nomor KEP-21/KPP.2701/2024 tanggal 15 Januari 2024;
- b. Membuat jadwal petugas SPT Tahunan dengan melibatkan pegawai KPP Pratama Jambi Telanaipura mulai dari pejabat pengawas, Fungsional, AR, Pelaksana dan PPNPN;
- c. Melakukan koordinasi dengan KP2KP yang berada di wilayah kerja KPP terkait pelaksanaan kegiatan pelayanan penerimaan SPT Tahunan di KP2KP;
- d. Melaksanakan program peningkatan penyampaian SPT Tahunan secara elektronik dengan tepat waktu pada bulan Januari s.d. April 2024 berdasarkan segmentasi Wajib pajak, yaitu Wajib Pajak Orang pribadi, Wajib Pajak Badan Strategis, Wajib Pajak Kewilayahan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah;
- e. Melakukan Bimtek terkait SPT Masa Unifikasi, SPT Tahunan dan Pemadanan NIK NPWP kepada Dinas terkait, di antaranya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan;
- f. Melakukan penyampaian informasi dan penyuluhan terkait pelaporan SPT Tahunan melalui media sosial, termasuk Twitter, Instagram, dan Youtube;
- g. Melakukan penyampaian informasi terkait pelaporan SPT Tahunan melalui *WhatsApp Blast*;
- h. Berkolaborasi dengan pihak eksternal seperti konsultan pajak, perusahaan asuransi, pemda, asosiasi bisnis untuk penyebaran informasi pelaporan Wajib Pajak tepat waktu;
- i. Membuka layanan penerimaan SPT Tahunan di kelas pajak KPP Pratama Jambi Telanaipura dibantu oleh Relawan Pajak selama masa pelaporan SPT Tahunan;
- j. Membuka layanan penerimaan SPT Tahunan di luar kantor, berupa layanan di Mal Pelayanan Publik dan Pojok Pajak ke Instansi Pemerintah serta Perusahaan yang memiliki Pegawai yang banyak;
- k. Melaksanakan Pekan Panutan Pelaporan SPT Tahunan bersama Gubernur/Wakil Gubernur Jambi, Wali Kota/Wakil Walikota Jambi, Rektorat Unja;
- l. Melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan dengan instansi pemerintah daerah,

- meliputi pemerintah daerah provinsi Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Muaro Jambi mulai dari tingkat provinsi, kota dan kabupaten, kecamatan, sampai dengan kelurahan: Dinas Kesehatan, Pendidikan Kota, BKD Provinsi Jambi, dan sekolah.
- m. Melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan dengan instansi/perusahaan yang banyak memiliki pegawai, di antaranya Angso Duo Sawit, Bank Jambi, dan Jambi Distribusindo Raya;
 - n. Melakukan penyuluhan yang diajukan oleh Wajib Pajak (Permintaan Narasumber), di antaranya Xaverius, UT, dan Dinas Kehutanan;
 - o. Melakukan NE secara masal untuk mengurangi penyebut perhitungan kepatuhan SPT Tahunan untuk tahun mendatang;
 - p. Melakukan kelas pajak untuk WP yang belum melaporkan SPT Tahunan secara berkala dan rutin; dan
 - q. Melakukan perekaman untuk WP yang menyampaikan pelaporan SPT Tahunan secara manual.

Dari Sisi Pengawasan

- a. Menjalankan Satgas Asistensi Pengisian SPT Tahunan PPh Badan;
- b. Berkoordinasi dengan kelurahan/ kecamatan dan pemberi kerja terkait pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024;
- c. Berkoordinasi dengan Pemberi Kerja terkait pelaporan SPT Tahunan Tahun 2024 dan Pemadanan Data NIK-NPWP karyawan; dan
- d. Berkoordinasi dengan Seksi PKD untuk *generate* Surat Teguran atas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang belum menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.

Dari Sisi KP2KP

- a. Menghubungi Dinas/Pemda yang ASN nya belum melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi khususMelanjutkan kerjasama dengan Dinas/Pemda yang ASN nya belum melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi agar segera melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan menyampaikan rapor kepatuhan pelaporan SPT;
- b. Melakukan bimbingan pembuatan bukti potong 1721 A2 kepada Bendahara OPD agar ASN masing-masing OPD dapat segera melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya; dan
- c. Melakukan Pojok Pajak di beberapa Dinas, Sekolah, dan Kantor Kecamatan sebagai upaya jemput bola pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi; dan
- d. Melakukan Pojok Pajak di beberapa Sekolah TK/PAUD/KB Swasta sebagai upaya jemput bola pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tercermin dari pencapaian IKU 3a-CP. Pada tahun 2024, KPP Pratama Jambi Telanaipura telah dapat mencapai target yang ditetapkan. Indeks capaian atas IKU 3a-CP sebesar 100.28% atau sebesar 233.839.354.552 dari target yang ditetapkan sebesar 233.178.273.000. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menunjang tercapainya IKU, antara lain:

- a. Pencarian data eksternal dan internal;
- b. Menindaklanjuti data pemicu dan data pengujian;
- c. Menindaklanjuti DPP kolaboratif; dan
- d. Melakukan visit dalam rangka menindaklanjuti SP2DK.

4. Edukasi dan Pelayanan yang efektif

Edukasi dan pelayanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakan yang melekat kepadanya. Dalam Sasaran Strategis ini terdapat dua IKU utama yang melekat, yaitu:

- a. 4a-CP: Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Jambi Telanaipura pada tahun 2024 sebesar 88.8% dengan indeks capaian sebesar 120%. KPP Pratama Jambi Telanaipura dapat mempertahankan capaian maksimal IKU 4a-CP dengan beberapa upaya aktif yang dilakukan, di antaranya:
 - Melakukan kegiatan penyuluhan kepada siswa SMP, SMA TGTS, Pajak Bertutur dan TGTC;
 - Melakukan Kegiatan Penyuluhan di instansi pemerintahan, kelas pajak dan melalui *podcast*;
 - Melakukan Penyuluhan *Business Development System* dengan instansi Kemenkeu Lainnya;
 - Melakukan Penyuluhan kepada Wajib Pajak untuk perubahan perilaku bayar dan lapor;
 - Membuka pelayanan SPT Tahunan di luar kantor, berupa layanan di *Mall Jambi Town Square (Jamtos)* dan Mal Pelayanan Publik;
 - Melaksanakan Pekan Panutan Pelaporan SPT Tahunan bersama Gubernur/Wakil Gubernur Jambi dan Wali Kota/Wakil Walikota Jambi; dan
 - Melakukan Penyuluhan terhadap Wajib Pajak DSPT Kolaboratif.

b. 4b-N: Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan dengan Tahun 2023. Pada Tahun 2024, Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan terealisasi sebesar 112.08% dari target sebesar 100%. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, yaitu memilih responden kooperatif yang telah menerima pelayanan dan penyuluhan pada Triwulan I, memilih Responden bendahara yang kooperatif, dan melakukan kordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Seksi P3 dalam memberikan Wajib Pajak yang akan dijadikan responden survei.

5. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Pengawasan pembayaran masa dapat dilihat dari capaian IKU dengan kode 5a-CP. Pada Tahun 2024, indeks capaian realisasi IKU 5a-CP sebesar 120%. Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah). Realisasi IKU 5a-CP telah diupayakan dengan optimal oleh KPP Pratama Jambi Telanaipura di antaranya dengan:

- a. Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan;
- b. Menerbitkan STP terhadap WP yang terlambat melakukan pelaporan dan/atau pembayaran pajak; dan
- c. Menindaklanjuti data DSE

6. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

Sasaran strategis Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif diampu oleh tiga IKU utama, yaitu:

- a. 6a-CP: Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Pada Tahun 2024, indeks capaian IKU 6a-CP sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dalam mencapai capaian tersebut KPP Pratama Jambi Telanaipura telah melakukan beberapa tindakan, antara lain:
 - Mencari dan atau mengumpulkan data atau informasi Wajib Pajak dalam rangka pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak;
 - Menindaklanjuti DPP kolaboratif yang turun;
 - Melakukan analisis mandiri terhadap Wajib Pajak yang mempunyai potensi di luar tahun berjalan;
 - Menerbitkan SP2DK;

- Menghubungi Wajib Pajak baik melalui telpon, WA maupun undangan konseling; dan
 - Melakukan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak.
- b. 6b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan
- Pada IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan, terdapat dua komponen utama yakni pemanfaatan data STP dan pemanfaatan data *matching*. Pada Tahun 2024, KPP Pratama Jambi Telanaipura berhasil mencapai indeks capaian realisasi di atas target yang ditetapkan sebesar 119.5%. Hal ini ditunjang dengan beberapa tindakan yang menunjang tercapainya IKU tersebut, antara lain menindaklanjuti Dafnom STP selain Tahun Pajak Berjalan di DSTP Approweb.
- c. 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu
- Pada IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu, terdapat tiga komponen, yaitu Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu, Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan, dan Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap Target PKM Pemeriksaan. Pada Tahun 2024, KPP Pratama Jambi Telanaipura berhasil mencapai indeks capaian realisasi di atas target yang ditetapkan sebesar 118.56%. Salah satu upaya yang telah dilaksanakan untuk memaksimalkan capaian IKU ini, yaitu berkoordinasi terkait penyusunan laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan Wajib Pajak KPP dengan seksi terkait.

7. Penegakan Hukum yang Efektif

Penegakan hukum yang efektif adalah salah satu upaya untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang tidak patuh. Dalam sasaran strategi ini terdapat tiga IKU utama yang menjadi target KPP Pratama Jambi Telanaipura. Adapaun tiga IKU tersebut, yaitu:

a. 7a-CP: Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penagihan diukur dengan dua parameter, yaitu Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan yang meliputi lima variabel (Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP, Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan, Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu, dan Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi) dan Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian yang meliputi dua variabel (Persentase Penyelesaian Penilaian dan Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu). Pada Tahun

2024, realisasi IKU 7a-CP mencapai 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga indeks capaian maksimal. Terdapat beberapa tindakan yang telah dilakukan pada tahun 2024 agar capaian IKU dapat maksimal. Adapun kegiatan tersebut, antara lain:

- Telah dilakukan rapat Komite Kepatuhan untuk melakukan pembahasan usulan DSPP secara rutin setiap bulan untuk dikirimkan ke Kanwil, serta mengumpulkan bahan baku pemeriksaan melalui usulan DSPP (*post audit*, RTLB, dll) untuk diusulkan pemeriksaan khusus maupun Rutin (penghapusan NPWP Badan/likuidasi);
- Berkordinasi dengan seksi PKD, Seksi Pengawasan Strategis dan Seksi Pengawasan Kewilayahan, untuk mencari Wajib Pajak yang berkualitas untuk diusulkan pemeriksaan;
- Menindaklanjuti ND-286/PJ.04/2024 tentang percepatan penyelesaian pemeriksaan sebelum implementasi CTAS. Membuat pengawasan dan menindaklanjuti secara berkala kepada FPP maupun Petugas Pemeriksa Pajak agar SP2 dapat diselesaikan tepat waktu;
- Membuat parameter kinerja FPP untuk memberikan penilaian kinerja FPP yang adil dan sesuai dengan IKU serta kondisi lainnya yang disepakati Bersama; dan
- Secara proaktif mencari tambahan bahan baku pemeriksaan, selain usulan DSPP, yang memiliki nilai konversi besar, seperti likuidasi, LB OP, LB PPh Badan, dll, untuk menambah kuantitas pemeriksaan dalam rangka pemenuhan target konversi.

b. 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

Pada Tahun 2024 tingkat efektivitas penagihan KPP Pratama Jambi Telanaipura terealisasi dengan baik dengan indeks capaian sebesar 120%. Adapun upaya yang telah dilaksanakan meliputi:

- Penerbitan dan pengiriman Surat Teguran sebanyak 7230 Surat Teguran;
- Penyampaian Surat Paksa kepada WP yang telah ditargetkan;
- Sudah dilakukan pengiriman surat permintaan pemblokiran, sebanyak 530 surat kepada 20 Bank (Bank BUMN atau Bank Swasta lainnya) atas 11 WP dan Penanggung Pajaknya;
- Berkordinasi dengan Bank-Bank untuk melakukan penyitaan atas rekening yang telah terblokir;
- Melakukan pemindahbukuan saldo rekening yang telah disita;

- Mengirimkan ND permintaan bantuan kepada penilai untuk melakukan penilaian atas aset sitaan;
- Mengusulkan usulan lelang ulang ke KPKNL atas aset sitaan dari PT Bumi Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 namun tidak ada peserta lelang sampai akhir pelaksanaan lelang yang menyatakan hasil Lelang Aset Sitaan tidak terjual;
- Mengirimkan surat himbauan pelunasan utang pajak kepada WP-WP yang diperkirakan tidak bisa disampaikan surat paksa, karena keterbatasan jangkauan dan waktu JSPN untuk melakukan Tinpen;
- Mengirimkan surat undangan pembahasan tunggakan dan membuat BA pembahasan atas WP-WP yang memiliki tunggakan besar, baik WP DSPC maupun Non DSPC;
- Membuat database pengawasan khusus Wajib Pajak DSPC;
- Membuat database WP Penunggak Pajak (dalam bentuk *excel*) dan membagi WP-WP tersebut menjadi 4 (empat) *cluster*, untuk memudahkan pemilihan target WP dan tindakan penagihan yang dilakukan;
- Mengirimkan ND permintaan bantuan intelijen Kanwil untuk menelusuri aset-aset WP (*aset tracing*) dalam rangka upaya usulan pencegahan dan tindakan penagihan lainnya; dan
- Berkordinasi, mengundang dan melaksanakan pembahasan dengan Kurator dan Likuidator atas WP-WP penunggak yang berstatus pailit dan likuidasi.

c. 7c-N Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Realisasi IKU 7c-N KPP Pratama Jambi Telanaipura dari target yang telah ditetapkan adalah 100%. Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait realisasi IKU ini, di antaranya:

- Wajib Pajak yang diusulkan untuk pemeriksaan bukti permulaan dianggap tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan
- Usulan bukti permulaan dapat dianggap sebagai realisasi apabila telah diterbitkan BA Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, beberapa Tindakan telah dilakukan, antara lain:

- Berkoordinasi dengan Kanwil terkait usulan pemeriksaan Bukti Permulaan;
- Menyampaikan usulan bukti permulaan sebelum jatuh tempo; dan
- Pengusulan IDLP atas nama PT Toga Bagi Karwita.

8. Data dan Informasi yang Berkualitas

Dalam sasaran strategis data dan informasi yang berkualitas terdapat dua IKU utama yang menjadi target, yaitu

- 8a-CP: Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
- 8b-CP: Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Pada Tahun 2024, KPP Pratama Jambi Telanaipura berhasil mencapai indeks capaian yang maksimal sebesar 120% atas dua IKU tersebut. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari adanya proses analisis data dari ILAP terkait potensi perpajakan dan pencarian data baik melalui *visit* maupun pengolahan data internal. Kinerja ini akan berusaha dipertahankan di periode selanjutnya.

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Upaya perbaikan organisasi dibutuhkan untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Terdapat tiga IKU terkait Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif, yaitu:

- 9a-N: Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
- 9b-N: Indeks Penilaian Integritas Unit
- 9c-N: Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Pada Tahun 2024, tiga IKU tersebut seluruhnya tercapai melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi IKU 9a-N adalah sebesar 116.9% dari target sebesar 100%. Adapun IKU 9b-N tercapai sebesar 94.23% dari target 85% sehingga indeks capainnya sebesar 110.86%. Sementara itu, realisasi IKU 9c-N adalah sebesar 99,10% dari target 90% sehingga indeks capaian yang diperoleh adalah 110.11%.

Untuk penghitungan IKU 9a-N, terdapat masalah adanya satu pegawai pada jabatan fungsional yang dinyatakan tidak lulus. Tindak lanjut atas permasalahan tersebut, di antaranya melakukan koordinasi dengan pegawai tersebut untuk mengadakan pengembangan kompetensi serta menganalisis kendala yang mungkin akan dihadapi.

Sementara itu, dalam rangka memaksimalkan IKU 9b-N, upaya-upaya yang telah dilaksanakan di antaranya memaksimalkan koordinasi dengan Seksi Pelayanan,

Pengawasan dan P3 (Seksi terkait) untuk memenuhi *longlist* responden survei yang diminta oleh Kantor Pusat serta memastikan capaian keikutsertaan responden dalam penyelesaian survei dengan memaksimalkan monitoring. Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian IKU 9c-N, yaitu melaksanakan imbauan manajemen kinerja dengan materi yang relevan dan sudah disiapkan sebelumnya, melakukan koordinasi dengan unit pemilik risiko terkait pengumpulan dokumen pendukung capaian realisasi, dan melakukan koordinasi dengan Seksi pemilik risiko dalam rangka penyusunan adendum manajemen risiko.

10. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Pada sasaran strategis ini terdapat satu IKU utama yang menjadi perhatian, yaitu 10a-CP: Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Realisasi dan indeks capaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan. Artinya, pelaksanaan IKU ini telah optimal dengan capaian maksimal. Hal ini terjadi karena adanya sinergi tim keuangan KPP Pratama Jambi Telanaipura. Terdapat beberapa upaya yang sudah dilakukan pada Tahun 2024 untuk mencapai realisasi tersebut, antara lain:

- Melakukan revisi DIPA dan RPD setiap triwulan guna penyesuaian pencairan anggaran;
- Melaksanakan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal secara terukur untuk memastikan kesesuaian RPD bulanan dan target penyerapan keseluruhan anggaran triwulanan dengan memperhatikan pengelolaan GUP, penyelesaian tagihan dan kontrak;
- Melakukan input capaian output secara teliti pada aplikasi SAKTI;
- Melakukan koordinasi dengan KPPN Jambi, Kanwil DJP Sumbarja dan Bagian Keuangan Kantor Pusat; dan
- Mengingatkan rekanan dan penyedia agar melaksanakan pekerjaan sesuai perencanaan dan jadwal yang sudah disepakati.

C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Kondisi pegawai di KPP Pratama Jambi Telanaipura per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Seksi/Subbagian/Kelompok	Formasi Pegawai *)	Jumlah Pegawai
Kepala Kantor	1	1
Pejabat Eselon IV	11	11
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	9	10

Seksi/Subbagian/Kelompok	Formasi Pegawai *)	Jumlah Pegawai
Seksi Penjaminan Kualitas Data	5	2
Seksi Pelayanan	11	8
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	7	7
Seksi Pengawasan		
AR Strategis	8	7
AR Kewilayahan	17	24
Pelaksana Pendukung	3	3
Kelompok Jabatan Fungsional		
Pemeriksa Pajak (non PPNS)	21	14
Penilai Pajak	2	2
Fungsional Penyuluh	6	6
KP2KP Sengeti	7	2
Jumlah	108	97

*) Formasi pegawai berdasarkan KEP-244/PJ/2021

Berdasarkan tabel pegawai tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan pegawai berdasarkan formasi yang telah ditetapkan, namun dapat pula mengalami kekurangan pegawai dikarenakan analisis beban kerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pegawai.

Dari jumlah komposisi pegawai per 31 Desember 2024, terdiri dari 63 laki-laki dan 34 perempuan yang tersebar di setiap seksi dan KP2KP. Adapun untuk tingkat pendidikan pegawai KPP Pratama Jambi Telanaipura terdiri dari:

Pendidikan Formal	Jumlah Pegawai
Pasca Sarjana (S2)	19
Perguruan Tinggi (S1) / (D4)	44
Akademi (D3)	19
Akademi (D1)	14
SMA/Sederajat	1
Total	97

D. ANALISIS ANGGARAN

Pada Tahun 2024 realisasi anggaran KPP Pratama Jambi Telanaipura mengalami penyerapan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan penilaian pada aplikasi IKPA, yaitu *Online Monitoring*-Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang menunjukkan bahwa KPP Pratama Jambi Telanaipura masuk dalam kategori unit kerja dengan capaian IKPA di atas 95,5.

Adapun rincian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

KPP Pratama Jambi Telanaipura		
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100
	Deviasi Halaman III DIPA	100
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	94.20
	Belanja Kontraktual	100
	Penyelesaian Tagihan	100
	Pengelolaan UP dan TUP	100
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100
Nilai Total		98.84
Konversi Bobot		100%
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		98.84

Terdapat dua kegiatan utama yang menjadi fokus dalam penyerapan anggaran, yaitu Program Pengelolaan Penerimaan Negara dan Program Dukungan Manajemen. Masing-masing dari kegiatan tersebut memiliki pagu masing-masing dengan capaian realisasi sebagai berikut:

Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.255.906.000	1.158.295.471	94.54%	97.610.529
Program Dukungan Manajemen	6.083.676.000	5.780.731.933	95.02%	302.944.067

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juncto Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, capaian pelaksanaan kinerja KPP Pratama Jambi Telanaipura pada Tahun 2024 dapat dikatakan sangat baik. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 KPP Pratama Jambi Telanaipura sebesar 109.02% yang mengalami peningkatan sekitar 2% dibandingkan Tahun 2023 dengan indeks capaian seluruhnya “hijau”. Selain itu, target penerimaan dapat terealisasi sebesar 100.8% (terbaik kedua di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi) dengan nilai penerimaan bersih Rp 2.501.066.955.362 dari target penerimaan sebesar Rp 2.481.138.241.000. Realisasi penerimaan KPP Pratama Jambi Telanaipura menyumbang cukup signifikan terhadap realisasi penerimaan pada lingkup Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi. Selain iklim ekonomi dan usaha yang baik, lingkungan kerja serta dedikasi yang tinggi dari seluruh pegawai KPP Pratama Jambi Telanaipura menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja KPP Pratama Jambi Telanaipura pada Tahun 2024.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi sebagai atasan langsung KPP Pratama Jambi Telanaipura maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Jambi Telanaipura sehingga dapat menimbulkan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

1. Data Penerimaan Tahun 2024

Kinerja Penerimaan

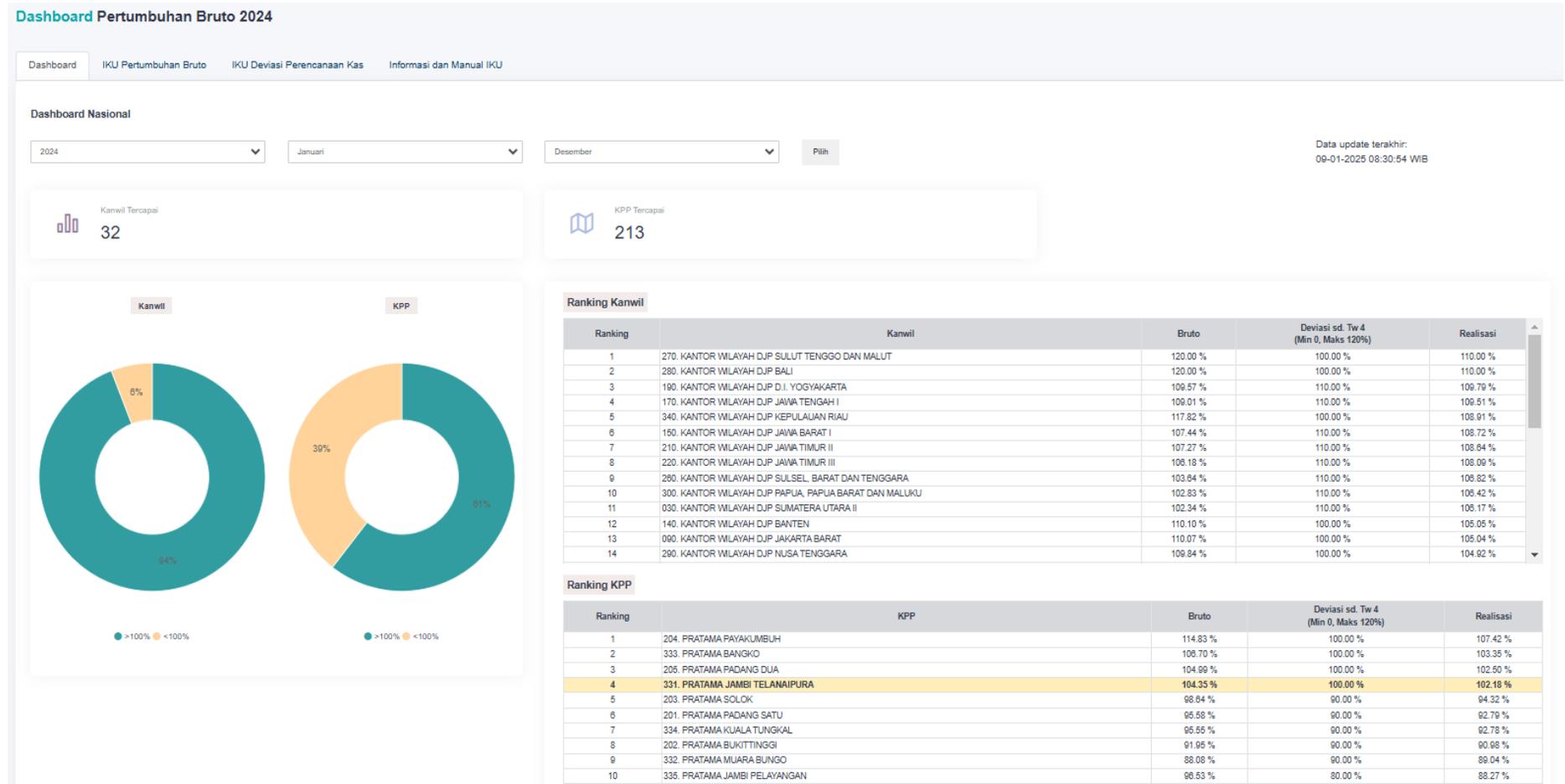
TAHUN BULAN SAMPAI UNIT URUT Perhitungan

[DOWNLOAD PENYESUAIN PERTUMBUHAN](#)

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN								PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN	
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO	NETTO		BRUTO	NETTO
1	PRATAMA PAYAKUMBUH	312,218,155,000	279,983,372,384	0	38,677,108,565	-1,936,388,322	1,971,302,355	318,695,394,982	1,957,067,752	316,738,327,230	269,576,058,139	268,844,671,479	101.45	18.22	17.81
2	PRATAMA JAMBI TELANAI PURA	2,481,138,241,000	2,780,885,840,577	1,724,205	232,773,979,648	-18,519,453,527	18,296,837,562	3,013,438,928,465	512,371,973,103	2,501,066,955,362	2,805,111,204,191	2,134,854,888,562	100.8	7.43	17.15
3	PRATAMA BANGKO	1,008,470,757,000	1,001,110,958,032	0	43,106,856,602	-9,403,907,096	10,299,672,886	1,045,113,580,424	29,650,888,218	1,015,462,692,206	951,430,845,331	924,409,527,719	100.69	9.85	9.85
4	PRATAMA PADANG DUA	1,264,616,059,000	1,316,406,311,719	0	101,007,118,580	-7,029,786,575	7,115,198,994	1,417,498,842,718	146,222,235,269	1,271,276,607,449	1,311,429,323,342	1,163,670,990,604	100.53	8.09	9.25
5	PRATAMA JAMBI PELAYANGAN	2,285,515,940,000	2,295,320,864,679	0	235,554,703,090	-48,959,365,349	47,391,264,343	2,529,307,466,763	234,380,781,769	2,294,926,684,994	2,544,977,332,726	2,262,609,557,747	100.41	-6.2	1.43
6	PRATAMA KUALA TUNGKAL	853,944,870,000	861,861,712,958	0	10,638,800,760	-29,476,455,112	27,015,228,485	870,039,287,091	12,730,111,713	857,309,175,378	884,426,454,848	854,758,615,026	100.39	-1.63	.3
7	PRATAMA SOLOK	767,485,458,000	776,590,360,762	0	31,176,281,070	-10,829,226,563	9,663,987,446	806,601,402,715	36,948,294,205	769,653,108,510	794,295,194,901	779,245,454,330	100.28	1.55	-1.23
8	PRATAMA BUKITTINGGI	837,939,420,000	875,089,994,027	0	47,220,857,264	-15,221,388,577	15,134,193,941	922,223,656,655	82,611,911,953	839,611,744,702	974,284,081,040	853,387,917,511	100.2	-5.34	-1.61
9	PRATAMA PADANG SATU	2,859,450,853,000	2,678,821,505,721	0	354,567,767,036	-6,886,209,575	7,445,138,279	3,033,948,201,461	171,829,273,822	2,862,118,927,639	3,083,288,290,917	2,909,451,559,440	100.09	-1.6	-1.63
10	PRATAMA MUARA BUNGO	783,848,685,000	896,026,309,364	1,512,686,252	10,613,441,967	-7,149,314,765	7,101,155,656	908,104,278,474	123,719,094,461	784,385,184,013	1,001,461,960,943	839,801,022,799	100.07	-9.32	-6.6
	Jumlah	13,454,628,438,000	13,762,097,230,223	1,514,410,457	1,105,336,914,582	-155,411,495,461	151,433,979,947	14,864,971,039,748	1,352,421,632,265	13,512,549,407,483	14,620,280,746,378	12,991,034,205,217	100.43	1.67	4.01

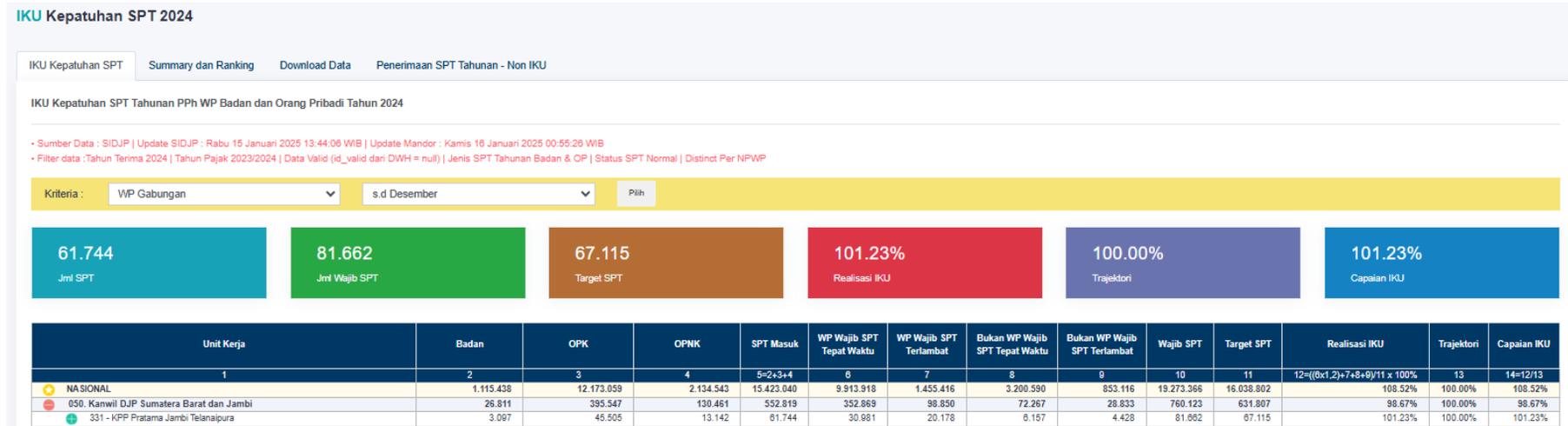
Sumber: Appportal-DJP data per 23 Januari 2025

2. Pertumbuhan Bruto



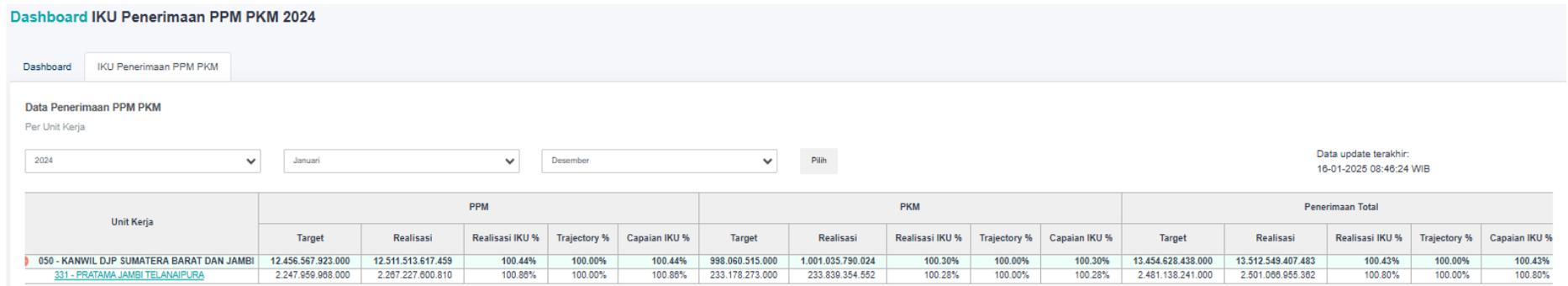
Sumber: Mandor-DJP data per 9 Januari 2025

3. Capaian Tingkat Kepatuhan



Sumber: Mandor-DJP data per 15 Januari 2025

4. Realisasi PPM



Sumber: Mandor-DJP data per 15 Januari 2025

5. Realisasi PKM

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM
Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih

Data update terakhir: 16-01-2025 08:46:24 WIB

Unit Kerja	PPM					PKM					Penerimaan Total				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
050 - KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	12.456.567.923.000	12.511.513.617.459	100.44%	100.00%	100.44%	998.060.515.000	1.001.035.790.024	100.30%	100.00%	100.30%	13.454.628.438.000	13.512.549.407.483	100.43%	100.00%	100.43%
331 - PRATAMA JAMBI TELANAIPURA	2.247.959.968.000	2.267.227.600.810	100.86%	100.00%	100.86%	233.178.273.000	233.839.354.552	100.28%	100.00%	100.28%	2.481.138.241.000	2.501.066.955.362	100.80%	100.00%	100.80%

Sumber: Mandor-DJP per 15 Januari 2025

6. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

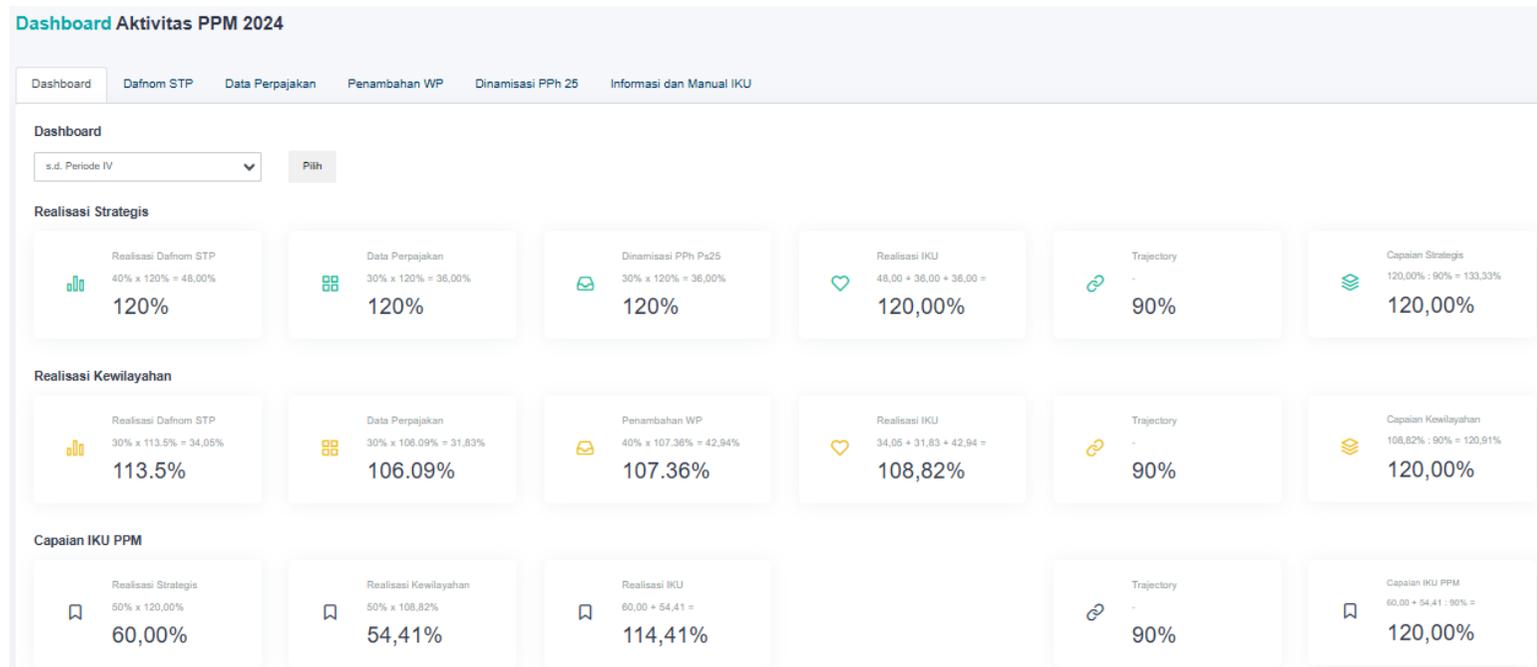
Dashboard Penyuluhan Yongki Surya Utama

Dashboard Utama | Data Unit Kerja | Detail Data | Panduan

Data Unit Kerja

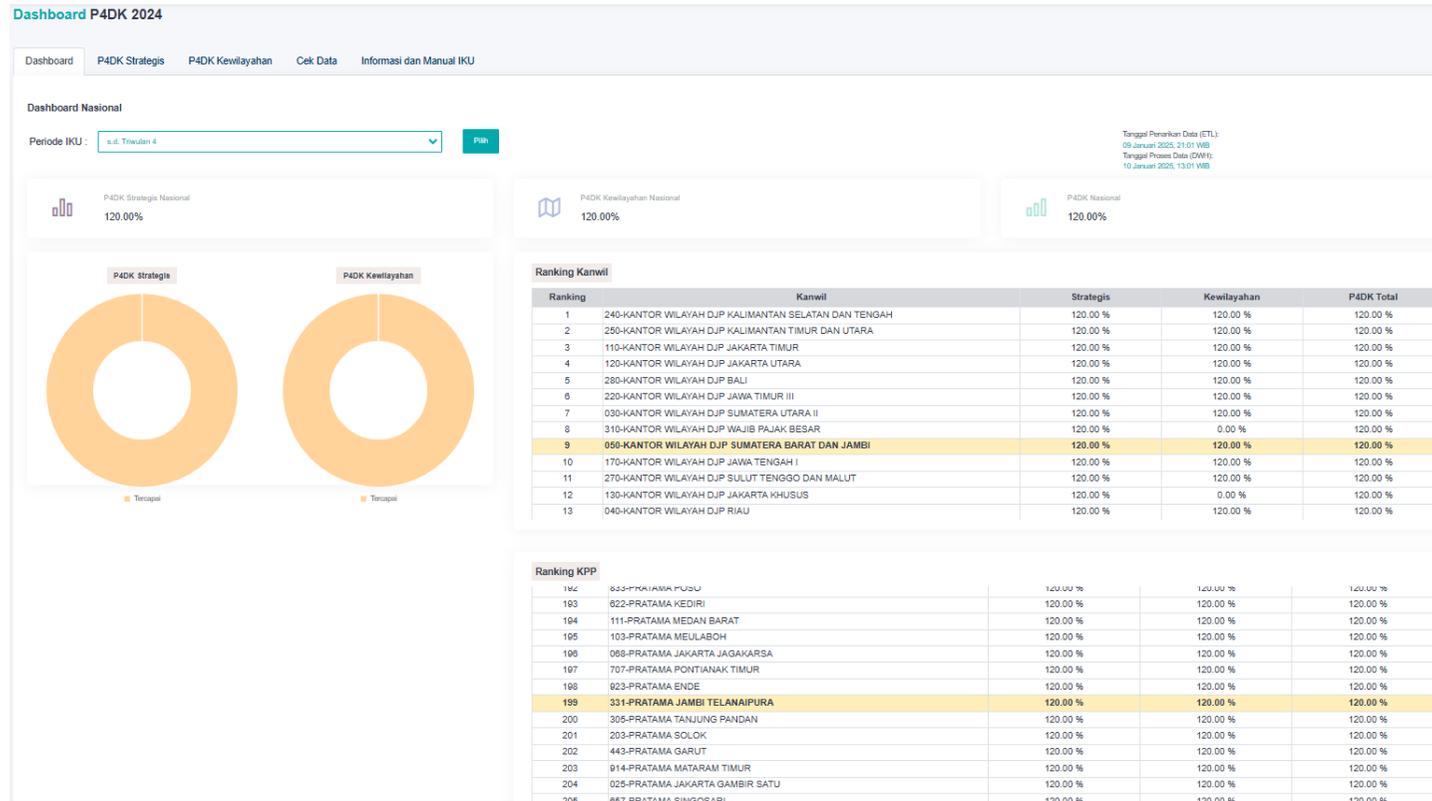
Kode Unit	Nama Unit	Realisasi								Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU				
				Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)	
		Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
331	PRATAMA JAMBI TELANAIPURA	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	61.70 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	
4113230000	KPP Pratama Jambi Telanaipura	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	63.64 %	42.18 %	88.80 %	87.88 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	
4113230100	KP2KP Sengeti	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	58.97 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	

7. Pengawasan Pembayaran Masa



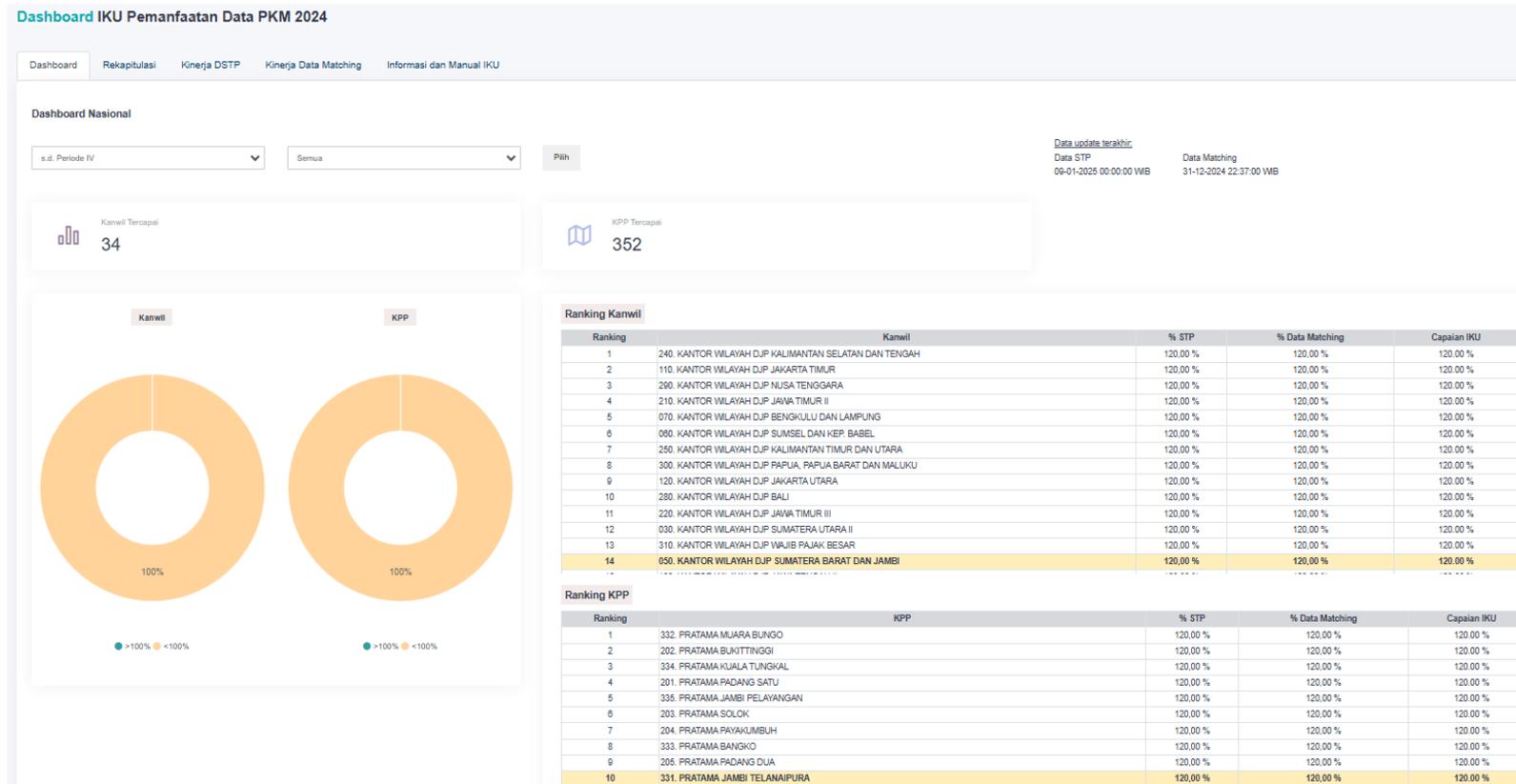
Sumber: Mandor-DJP per 15 Januari 2025

8. Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan



Sumber: Data Mandor-DJP per 15 Januari 2025

9. Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan



Sumber: Mandor-DJP per 9 Januari 2025

10. Efektivitas Pemeriksaan

CAPAIAN KOMPONEN TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN (60%)

Var	Variabel	Bobot	Target	Angka	Realisasi	Capaian per Variabel	Capaian x Bobot
Var 1	Nilai SKP Terbit Tahun Berjalan	15%	75%	92,10% + 70,37%	88,84%	118,45%	17,77%
	Data Potensi DSPP						
Var 2	Nilai SKP Disetujui	25%	100%	87,25	107,72%	107,72%	26,93%
	Nilai SKP Terbit Tahun Berjalan			81			
Var 3	Realisasi LHP Konversi	30%	100%	164,75	105,61%	105,61%	31,68%
	Target LHP Konversi			156			
Var 4	LHP Tepat Waktu	25%	75%	199,8	106,28%	120,00%	30,00%
	LHP Selesai			188			
Var 5	Ketetapan Terbit dibandingkan Nilai Restitusi	5%	70%	20	76,92%	109,89%	5,49%
	Jumlah Pemeriksaan			26			
						Jumlah	111,87%
						Target IKU	80%
						Pencapaian IKU	120,00%
						Capaian Bobot 60%	72,00%

CAPAIAN KOMPONEN TINGKAT EFEKTIVITAS PENILAIAN (40%)

Var	Variabel	Bobot	Target (TW II)	Angka	Realisasi	Capaian per Variabel	Capaian x Bobot
Var 1	Persentase Penyelesaian Penilaian	60%	40%	98,21% * 184,96%	181,63%	120,00%	72,00%
Var 2	Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	40%	90%	45,2	118,95%	120,00%	48,00%
				38			
						Jumlah	120,00%
						Target IKU	100%
						Pencapaian IKU	120,00%
						Capaian Bobot 40%	48,00%
						Capaian IKU 7a-CP	120,00%

Sumber: Data Seksi P3

11. Efektivitas Penagihan

I. VARIABEL 1 - TINDAKAN PENAGIHAN (50%)						
No	Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	% Realisasi	% Bobot	% Pencapaian
1	Surat Teguran	2638	7743	274,07%	19%	22,80%
2	Surat Paksa	2142	2612	121,94%	29%	34,80%
3	Penyitaan	92	205	270,65%	8%	9,60%
4	Pemblokiran	46	94	160,87%	28%	33,60%
5	Penjualan Barang Sitaan	14	28	185,71%	16%	19,20%
6	Pencegahan	1	2	200,00%	0%	0,00%
Jumlah						120,00%
Bobot IKU						50,00%
Pencapaian IKU						60,00%
II. VARIABEL 2 - TINDAK LANJUT DSPC (20%)						
Kegiatan	Target	Realisasi	% Realisasi	% Bobot	% Pencapaian	
Tindak Lanjut DSPC 100 WP	100	72	144,00%	20%	24,00%	
Jumlah						24,00%
Pencapaian IKU						24,00%
III. VARIABEL 3 - PENCAIRAN DSPC (30%)						
Kegiatan	Target	Realisasi	% Realisasi	% Bobot	% Pencapaian	
Pencairan DSPC 100 WP	10.953.769.732	18.439.108.180	168,34%	30%	36,00%	
Jumlah						36,00%
Pencapaian IKU						36,00%
Jumlah (Var 1 + Var 2 + Var 3)						120,00%
Target IKU TW 4						75,00%
Pencapaian IKU TW 4						120,00%

Sumber: Data Seksi P3

12. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI</p> <p>JALAN KHATIB SULAIMAN NO. 53 PADANG, KODE POS 25135 TELEPON (0751) 7055515; FAKSIMILE (0751) 7055562; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id</p>								
<p>BERITA ACARA PENELAAHAN USUL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Nomor BA- 14/USULBP/WPJ.27/2024</p>									
<p>Hari, Tanggal : Kamis, 24 Oktober 2024 Waktu : Pukul 09.00 s.d 11.00 WIB Tempat : Zoom Meeting (ID : 988 015 1009)</p>									
Seksi Pengawasan II									
II. DASAR USULAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN									
<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Nomor</th><th>Tanggal</th><th>Unit Pengusul</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>ND-1604/KPP.2701/2024</td><td>10 Oktober 2024</td><td>KPP Pratama Jambi Telanaipura</td></tr></tbody></table>	No.	Nomor	Tanggal	Unit Pengusul	1.	ND-1604/KPP.2701/2024	10 Oktober 2024	KPP Pratama Jambi Telanaipura	
No.	Nomor	Tanggal	Unit Pengusul						
1.	ND-1604/KPP.2701/2024	10 Oktober 2024	KPP Pratama Jambi Telanaipura						
III. IDENTITAS WAJIB PAJAK									
<p>Wajib Pajak : PT Smart Sumber Energi NPWP : 40.040.712.8-331.000 Alamat : Jl. Rd. Wijaya Rt 020 Rw 000, Paal Lima Kota Baru Kota Jambi, Jambi</p>									
IV. URAIAN PEMBAHASAN									
A. Ringkasan dugaan perbuatan pidana									

Sumber: Data Seksi P3

13. Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Dashboard KPD L 2023

Dashboard Rekapitulasi Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi
Per Unit Kerja

Semua ▼ Januari ▼ Desember ▼ Pilih

Data update terakhir:
03-01-2024 05:18:51 WIB

Unit Kerja	Data Objek	Perbaikan	Material	Formal	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Selesai	Tepat Waktu	Terlambat	Target	Realisasi IKU	Trajectory
a	b	c	d	e	f=c+d+e	g	h	i	j=h+i	k	l	m	n=k/m	o
050 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	11.756	47	6	14	67	221	5.246	2.222	11.468	11.283	185	8.464	133.31%	100%
331 - PRATAMA JAMBI TELANAIPURA	1.208	10	3	2	15	28	956	209	1.165	1.112	53	888	125.23%	100%

**MONITORING DAN EVALUASI REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERSENTASE PENYELESAIAN LAPORAN PENGAMATAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
s.d PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2023
per 08 Desember 2023**

No.	Nama Unit Kerja	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KPP Pratama Padang Satu	3	1	33%	Belum mencapai target
2	KPP Pratama Padang Dua	3	1	33%	Belum mencapai target
3	KPP Pratama Solok	3	4	133%	Melebihi target
4	KPP Pratama Bukittinggi	3	4	133%	Melebihi target
5	KPP Pratama Payakumbuh	3	5	167%	Melebihi target
6	KPP Pratama Jambi Telanaipura	3	4	133%	Melebihi target
7	KPP Pratama Jambi Pelayangan	3	3	100%	Telah mencapai target
8	KPP Pratama Bangko	3	5	167%	Melebihi target
9	KPP Pratama Muara Bungo	3	3	100%	Telah mencapai target
10	KPP Pratama Kuala Tungkal	3	4	133%	Melebihi target
	Jumlah	30	34	113%	

Sumber: Mandor-DJP

14. Penghimpunan Data Regional dari ILAP

Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-KPP)									
050 - KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI									
Diurutkan Berdasar : Unit Kerja									
Tahun Data : 2023									
NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAJINYA			CAPAIAN IKU	DETIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	050 - KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI (DATA PROPINSI)	16	3	2	13	0	0	64,12	Lihat
2	201 - KPP PRATAMA PADANG SATU	25	8	6	13	6	4	58	Lihat
3	202 - KPP PRATAMA BUKITTINGGI	33	22	16	17	13	8	69,47	Lihat
4	203 - KPP PRATAMA SOLOK	39	22	9	18	11	8	53,4	Lihat
5	204 - KPP PRATAMA PAYAKUMBUH	20	12	11	9	7	7	82,63	Lihat
6	205 - KPP PRATAMA PADANG DUA	27	12	5	11	6	4	51,34	Lihat
7	331 - KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA	11	11	7	6	5	2	71,93	Lihat
8	332 - KPP PRATAMA MUARA BUNGO	14	12	4	7	7	6	65,43	Lihat
9	333 - KPP PRATAMA BANGKO	28	16	16	12	6	6	82	Lihat
10	334 - KPP PRATAMA KUALA TUNGKAL	14	13	10	5	4	2	76,91	Lihat
11	335 - KPP PRATAMA JAMBI PELAYANGAN	15	9	4	11	6	3	59,33	Lihat

Sumber: Data Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

15. Pegawai yang memenuhi Standar Kompetensi

Data Hasil Assessment Center (Pejabat Struktural) dan Uji Kompetensi (Fungsional dan Pelaksana) Triwulan IV Tahun 2024							
KPP Pratama Jambi Telanaipura							
NO	NAMA	NIP	JENJANG JABATAN	JPM MANAGERIAL DAN SOSIAL KULTURAL	KATEGORI	JPM per DESEMBER 2023	PENGEMBANGAN KOMPETENSI (Sudah/Belum)
1	EDI SIHAR TAMBUNAN	197609151999031003	Eselon III	96.30%	Di atas Standar	96.30%	-
2	IRHAM BUANA PUTRA	198312242004121001	Eselon IV	100.00%	Di atas Standar	100.00%	-
3	HERU WIDYA WINARNO	197301031992121001	Eselon IV	100.00%	Di atas Standar	100.00%	-
4	UDING ISLAHUDIN	197212111993021001	Eselon IV	88.89%	Di atas Standar	88.89%	-
5	ARIEF PRASETYO	197305221994031001	Eselon IV	111.11%	Di atas Standar	111.11%	-
6	ERYADI	197302221998031002	Eselon IV	88.89%	Di atas Standar	88.89%	-
7	YONGKI SURYA UTAMA	197304231998031006	Eselon IV	83.33%	Di atas Standar	85.19%	-
8	ASEP ANDI SUPRAYOGI	197307121998031002	Eselon IV	88.89%	Di atas Standar	88.89%	-
9	PAISAL	197408141999031001	Eselon IV	88.89%	Di atas Standar	88.89%	-
10	IRWAN ADITYA	197601142002121001	Eselon IV	88.89%	Di atas Standar	88.89%	-
11	TOMY FIRMANSYAH	198407152006021004	Eselon IV	88.89%	Di atas Standar		-
12	IRMA MIRANTI	198607082009012007	Eselon IV	83.33%	Di atas Standar	83.33%	-
13	AMIRAH THIFALA PRAMONO	199911092018122003	Pelaksana		Lulus		-
14	CECEP HENDRA WIJAYA	197805092000011001	Pemeriksa Pajak Muda		Lulus		-
15	DEWI CAHYATI	198203182002122001	Pemeriksa Pajak Muda		Tidak Lulus		Sudah Pengembangan

16	DOAN WIRO PASARIBU	199403022013101001	Account Representative		Lulus		-
17	FARRAS SALSABIILA	200006302018122001	Pelaksana		Lulus		-
18	FEBBY ENGLA SANDINA SY	199601292015122002	Pelaksana		Lulus		-
19	FITRIANSYAH	198705292009121003	Account Representative		Lulus		-
20	MELLY ASMI	199606062015122002	Pelaksana		Lulus		-
21	MUHAMMAD HAYKAL	199703162018121004	Juru Sita		Lulus		-
22	MUHAMMAD WAHYU REZA UTAMA	199707122016121002	Pelaksana		Lulus		-
23	NOVIYANTO	197711071998031003	Account Representative		Lulus		-
24	PRIBADI DHISA AGUNG	199610302016121004	Pelaksana		Lulus		-
25	RAHMA AULIA ANINDITA	199504122016122004	Pelaksana		Lulus		-
26	RIZKY LISTYANINGSIH	199804212018122003	Pelaksana		Lulus		-
27	ROCKYANO SINAGA	199704222016121001	Pelaksana		Lulus		-
28	SINDHU GATIRAGA	198210302003121001	Account Representative		Lulus		-
29	SINGGIH PRAMONO	198908032010121005	Pemeriksa Pajak Pertama		Lulus		-
30	TRI WAHYUNI	199604212016122001	Pelaksana		Lulus		-
31	TRIA LESPITA	198709022010122005	Account Representative		Lulus		-
32	WIJI KURNIA DEWI	199907272018122002	Pelaksana		Lulus		-